



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TAHUN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Triwulan I (TW I) Politeknik KP Sorong Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian target kinerja Politeknik KP Sorong pada TW I tahun 2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya dan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat dijadikan gambaran tentang program, kegiatan, dan capaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan untuk kegiatan berikutnya.

Sorong, 20 April 2026
Direktur.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan.....	2
3. Tugas dan Fungsi.....	2
4. Keragaman SDM.....	9
5. Sistematika Pelaporan.....	10
6. Potensi dan Permasalahan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
1. Rencana Strategis	17
2. Rencana Kerja tahunan	25
3. Perjanjian Kinerja	26
4. Pengukuran Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
1. Prestasi Kinerja	29
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	29
3. Akuntabilitas Keuangan	51
4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya.....	56

BAB IV	PENUTUP	58
	1. Capaian Kinerja Utama	58
	2. Permasalahan dan Rekomendasi	59
LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah PNS dan PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik KP Sorong, Periode 2025 – 2029.....	20
Tabel 3. Alokasi Anggaran Politeknik KP Sorong Tahun 2026.....	25
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Politeknik KP Sorong Tahun 2026	26
Tabel 5 Capaian Kinerja Politeknik KP Sorong TW I Tahun 2026	30
Tabel 6. Capaian Penyerapan Lulusan Satuan Pendidikan KP ke DUDIKA	32
Tabel 7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)	37
Tabel 8. Perbandingan Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup	37
Tabel 9. Target Penyerapan Masing – Masing Belanja	46
Tabel 10. Kategori Rasio Dispensasi SPM	48
Tabel 11. Bobot Indikator nilai Kinerja Anggaran.....	50
Tabel 12. Realisasi Anggaran Politeknik KP Sorong Per Sasaran Kegiatan hingga TW I Tahun 2025	52
Tabel 13. Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Output	53
Tabel 14. Perhitungan Efisiensi Anggaran Politeknik KP. Sorong TW I	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik KP Sorong.....	4
Gambar 2. Keragaman Pegawai Politeknik KP Sorong.....	10
Gambar 3. Status Indeks Capaian IKU	28
Gambar 4. NKO Politeknik KP Sorong TW I Tahun 2026.....	29
Gambar 5. Kategori nilai PM SAKIP	38
Gambar 6. NKO Politeknik KP Sorong TW I Tahun 2026.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Politeknik KP Sorong.....	60

DAFTAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Interim Triwulan I Politeknik KP Sorong Tahun 2026 merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja Politeknik KP Sorong TW I Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online : www.kinerjaku.kkp.go.id, pengukurannya dilakukan berdasarkan Manual IKU pada masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian Nilai Prestasi Sasaran Strategis Politeknik KP Sorong TW I pada tahun 2026 adalah sebesar 115,00% dimana pada terdapat 3 IKU yang di ukur dengan rincian capaian sebagai berikut :

1. IKS 01.01 : Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) target TW I pada tahun 2026 yaitu 7 orang dengan capaian 12 orang dengan persentase capaian 120 %. Pengukuran IKU ini bersumber dari data lulusan tahun 2026;
2. IKS 02.01 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%) dengan target pada TW I yaitu 86 dengan capaian 86 dan tingkat ketercapaian 100% , pada TW I ini Politeknik KP. Sorong tidak memiliki Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan, sehingga tingkat ketercapaian 117,65% dengan nilai capaian ini tidak mempengaruhi nilai capaian pada IKU lain;
3. IKS 02.05 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%), dengan target sebesar 77, realisasi 100 dan tingkat ketercapaiannya 120%, nilai ini sesuai dengan yang diumumkan pada SIRUP, agar tidak mempengaruhi nilai capaian pada IKU lain;

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Salah satu wujud atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu pembuatan Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun LKj, dimana LKj tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.

LKj Tahun 2026 ini merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran di 2026 berdasarkan indikator yang ada maka disusunlah LKj Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2026.

Politeknik KP. Sorong merupakan salah satu lembaga pendidikan Pusat Pendidikan KP. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung setiap program yang digagas oleh Menteri KKP antara lain menetapkan lima program prioritas berbasis Ekonomi Biru yaitu : (1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota; dan (3) Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; (4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan. Pusat Pendidikan KP berkontribusi pada program terobosan tersebut dengan menyiapkan kompetensi peserta didik dari satuan pendidikan KP yang jika lulus, dapat mendukung penangkapan terukur, kampung nelayan maju, dan mendukung kampung perikanan budidaya, sehingga Politeknik KP. Sorong terus meningkatkan kapasitas tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan mendorong untuk mengikuti pendidikan

formal maupun non formal serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan agar menciptakan lulusan kompeten yang siap mendukung tiga terobosan menteri KKP tersebut.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2026 adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun 2026.
- b) Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi Politeknik Kelautan Perikanan Sorong di Tahun 2026.
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Politeknik KP Sorong untuk meningkatkan kinerja

3. Tugas dan Fungsi

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang selanjutnya disebut Politeknik KP Sorong, adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Riset dan Sumberdaya Manusia kelautan dan Perikanan.

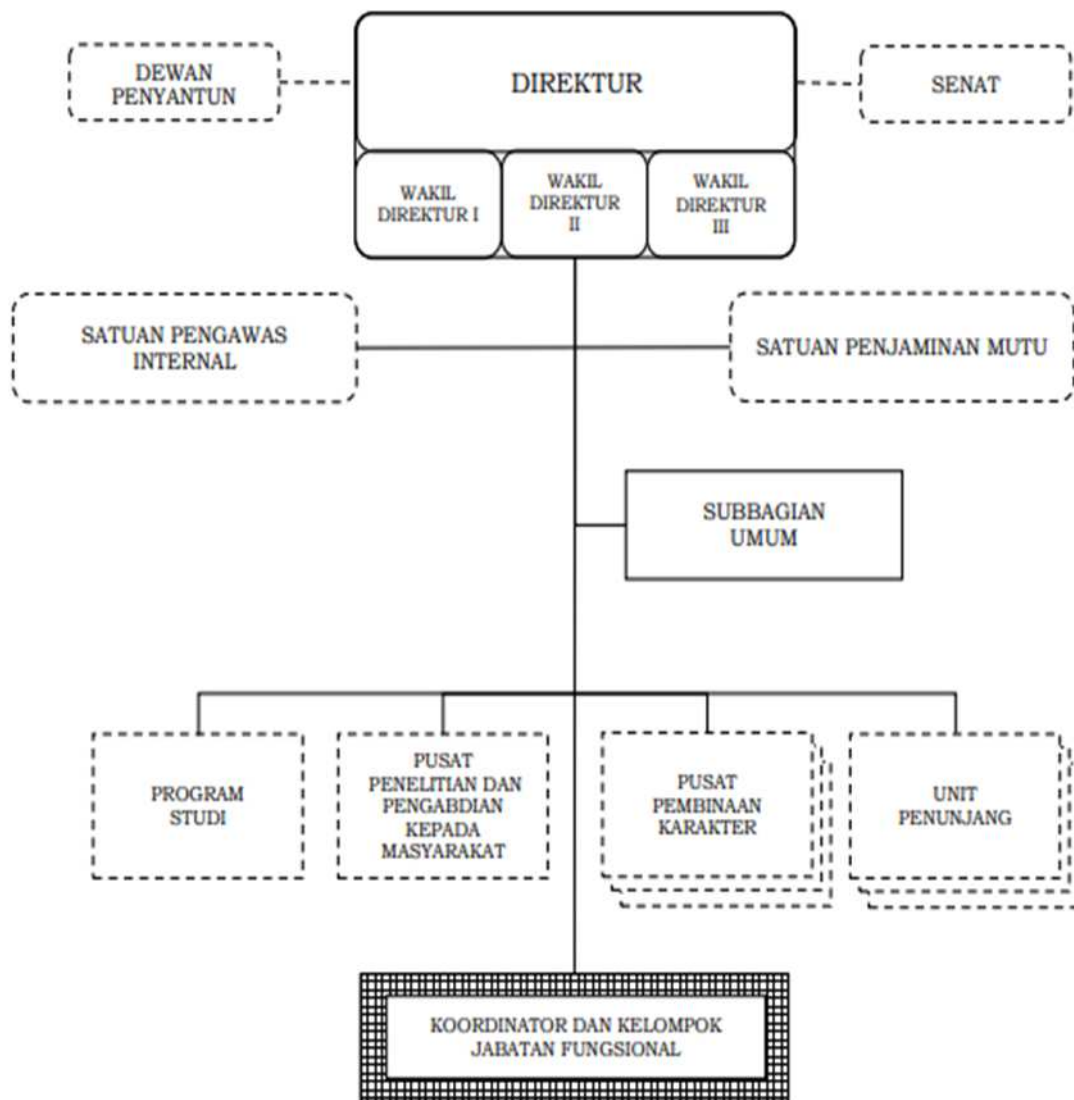
Politeknik KP Sorong sebelumnya adalah Akademi Perikanan Sorong yang resmi berdiri pada tanggal 01 Mei 2001, berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26.J/MEN/2001 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan professional program Diploma bidang Perikanan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan, kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang Kelautan dan Perikanan, serta mengembangkan pendidikan vokasi dan profesi di bidang kelautan dan perikanan maka Akademi Perikanan Sorong diubah statusnya menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Berdasarkan PERMEN KP Nomor : 61/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

vokasi di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Politeknik KP Sorong mempunyai tugas **menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan** Dalam menjalankan tugas Politeknik KP Sorong menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program pendidikan;
- 2) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- 5) pengembangan sistem penjaminan mutu;
- 6) pelaksanaan pembinaan karakter;
- 7) pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- 8) pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- 9) pelaksanaan pengawasan internal;
- 10) pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
- 11) pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi Politeknik KP Sorong , maka, sesuai dengan PERMEN KP Nomor : 91/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020, struktur organisasi Politeknik KP Sorong dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik KP Sorong.

(Sumber : Kepegawaian Politeknik KP Sorong)

1. Direktur dan Wakil Direktur;
Direktur merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik KP Sorong. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Terdiri atas :
 - a. Wakil Direktur I atau Wakil Direktur Bidang Akademik adalah dosen yang yang

- diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.
- b. Wakil Direktur II atau Wakil Direktur Bidang Umum adalah Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, dan kerumahtanggaan. ; dan
 - c. Wakil Direktur III atau Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni adalah Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembinaan karakter.
- 2. Dewan Penyantun;
Dewan penyantun merupakan bagian dari organisasi Politeknik KP yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
 - 3. Senat;
Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik KP yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
 - 4. Satuan Penjaminan Mutu;
Satuan penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan
 - 5. Satuan Pengawas Internal;
Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur Politeknik KP Sorong Subbagian Umum;

Subbagian Umum merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang umum yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh Wakil Direktur II.
 - 6. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan barang

milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan barang milik negara;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Keuangan

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan keuangan dan barang milik Negara.

- b. Urusan Kepegawaian

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, urusan hukum dan kerja sama, serta ketatalaksanaan.

- c. Urusan Tata Usaha.

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

7. Program Studi;

Adalah unsur pelaksana akademik Politeknik KP yang mempunyai tugas unsur pelaksana akademik Politeknik KP Sorong yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan, yang dipimpin oleh Ketua Program Studi dan

dibantu oleh sekretaris , berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur I.

Program Studi mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan, dan pengajaran, serta pembinaan civitas akademika.

Program Studi pada Politeknik KP Sorong terdiri dari :

- a. Program Studi Diploma III Teknik Penangkapan Ikan;
- b. Program Studi Diploma III Mekanisasi Perikanan; dan
- c. Program Studi Diploma III Teknik Budidaya Perikanan.

8. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi pusat, serta evaluasi dan pelaporan, yang dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.

9. Pusat Pembinaan Karakter;

Pusat Pembinaan Karakter mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaaan taruna, pembinaan tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan taruna, dan urusan administrasi Pusat, yang dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.

10. Unit Penunjang;

Merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik KP, yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan dibina oleh Wakil Direktur I.

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan dan audio visual serta dokumentasi.
- b. Unit Laboratorium;
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Unit Teknologi Informatika;
Mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembann keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.
- d. Unit Praktek Kerja (UPK);
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana/prasarana yang terdiri dari UPK armada Kapal Latih, UPK BST (Basic Safety Training), UPK Fishing Gear, UPK Navigasi, UPK FNS (Fishing Navigation Simulator), UPK Scuba DIing, UPK Bengkel Manufaktur, UPK Elektrikal, UPK Refrigrasi, UPK Bengkel Mesin Induk, UPK Budidaya Air Payau, UPK Budidaya Air Tawar, UPK Budidaya Air Laut, UPK Hatchery dan UPK Keramba Jaring Apung(KJA).
- e. Unit Sertifikasi;
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
- f. Unit Asrama;
Mempunyai tugas melakukan melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi.
- g. Unit Kesehatan;
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pelayanan kesehatan taruna dan pegawai.
- h. Unit Bimbingan dan Konseling
Mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada taruna.

11. Kelompok Jabatan Fungsional.

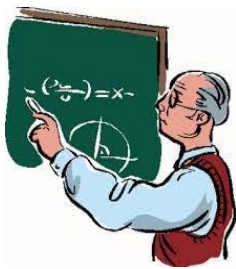
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Dosen, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya.

4. Keragaan SDM

Pada tahun 2026, Politeknik KP Sorong memiliki sumberdaya manusia sebanyak 110 orang, terdiri dari PNS berjumlah 85 orang dengan jenis kelamin laki-laki 65 orang dan perempuan 20 orang; PPPK berjumlah 21 orang dengan jenis kelamin laki-laki 16 orang dan perempuan 5 orang serta Tenaga Kontrak berjumlah 4 orang dengan jenis kelamin laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang. Keragaman Pegawai Politeknik KP. Sorong dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Jumlah PNS dan PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	PNS	65	20	85
2	PPPK	16	5	21
3	Tenaga Kontrak (PPNPM, PJLP)	2	2	4
Total		83	27	110



Jumlah Dosen : 31 orang

Dosen Prodi TPI : 12 orang

Dosen Prodi MP : 8 orang



JFT : 57 orang

JFU : 49 orang

Gambar 2. Keragaman Pegawai Politeknik KP Sorong

(Sumber: Kepegawaian Politeknik KP)

Berdasarkan data tersebut (Tabel 1), komposisi pegawai masih didominasi oleh laki-laki, terutama pada kategori PNS dan PPPK, sementara keterwakilan perempuan relatif lebih rendah. Dalam rangka mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG), kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan, baik dalam rekrutmen, pengembangan karier, maupun pengambilan keputusan. Meskipun pada tenaga kontrak sudah terlihat keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, secara keseluruhan masih diperlukan kebijakan yang lebih responsif gender untuk mendorong proporsi yang lebih adil dan inklusif di semua jenis pegawai.

5. Sistematika Pelaporan

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- 1) Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala pada Tahun 2026.

- 2) Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Politeknik KP Sorong seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Politeknik KP Sorong
- 3) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Politeknik KP Sorong Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja Politeknik KP Sorong Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.
- 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
- 5) Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
- 6) Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

6. Potensi dan Permasalahan

a) Potensi

Potensi yang tersedia di Provinsi Papua Barat Daya merupakan model kekayaan bagi masyarakat papua barat daya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan tersebut tentu sangat membutuhkan ketersediaan SDM-KP yang berkompeten, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi dalam mengamalkan ilmu dan kemampuannya. Politeknik KP Sorong sejak tahun 2004 telah berkiprah dalam penyediaan SDM-KP berkualifikasi Ahli Madya Perikanan. Jumlah lulusan yang telah dilepas ke dunia kerja sampai tahun ini mencapai ± 1286 orang, mereka telah bekerja di berbagai dunia pekerjaan.

Di samping memberikan kontribusi berupa SDM-KP tersebut di atas, Politeknik KP Sorong juga secara kontinyu melakukan kajian/riset terhadap problema lingkungan, dan hasilnya dipublikan di jurnal ilmiah, serta dikontribusikan pada masyarakat dan pemerintah setempat (pengabdian pada masyarakat).

b) Permasalahan

Permasalahan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan disini adalah masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dibebankan pada Politeknik KP Sorong. Masalah yang teridentifikasi merupakan suatu keadaan yang diikhtiarkan untuk diselesaikan secara sistematis yaitu:

I. Penyelenggaraan Pendidikan KP Sorong

- a. Dalam tahun 2020-2024, Politeknik KP Sorong berencana mendirikan program studi yang berjenjang Diploma IV, serta berencana juga untuk mendirikan Program Pasca Sarjana Terapan. Rencana ini di dorong oleh adanya kebutuhan daerah terhadap SDM-KP yang berkualifikasi Sarjana Sains Terapan dan Magister Terapan.

Masalah yang harus diselesaikan terhadap rencana tersebut adalah :

1. Tenaga dosen untuk untuk program D-IV harus diadakan sebanyak 5 orang dengan kualifikasi minimal S-2.
 2. Tenaga dosen untuk program pasca sarjana terapan yang dibutuhkan sebanyak 6 orang dengan kualifikasi doktoral. Saat ini sudah tersedia 5 doktoral, dan akan diperoleh 1 orang doktoral (tugas belajar). Namun, keenam dengan berkualifikasi doktoral saat ini dalam posisi sebagai dosen jenjang D-III, dimana jika keenamnya dimutasikan ke Program Pasca Terapan, maka terjadi kekurangan pada jenjang D-III. Oleh karena itu perlu diadakan dosen pengganti untuk jenjang D-III sebanyak 6 orang dengan kualifikasi S-2.
- b. Dengan adanya rencana pendirian jenjang D-IV dan pendirian Program Pasca Sarjana Terapan, maka perlu dibangun gedung sebanyak 2 unit untuk pengelolaan kedua program baru tersebut. Di samping itu, jika program-program ini berdiri, maka perlu penambahan ruang kuliah, dan sarana yang diperlukan.
 - c. Bahwa produk kegiatan Politeknik KP Sorong yang utama adalah SDM-KP yang berkualifikasi ahli madya/sarjana sains terapan (jika program D-IV berdiri), yang diharapkan produk ini dapat dimanfaatkan secara optimal, oleh dunia kerja. Dunia kerja disini adalah bidang usaha/industri, bidang

pemerintahan, dan wirausaha mandiri. Namun, selama ini proses rekrutment produk (SDM-KP) tersebut berlangsung secara alami, untuk mengoptimalkan proses rekrutmen tersebut, kiranya perlu dibangun sinergitas antara Politeknik KP Sorong (hulu) dengan pihak pemanfaat SDM-KP (hilang). Meskipun upaya membentuk sinergitas tersebut tidaklah mudah, namun perlu diikhtiarkan secara sistematis.

Khusus produk SDM-KP yang diharapkan menciptakan wirausaha mandiri, perlu dilakukan bimbingan terhadap mereka yang berminat untuk menciptakan wirausaha mandiri. Bimbingan disini menyangkut bantuan modal usaha, bimbingan manajemen, dan bimbingan marketing. Kita belum memiliki instrumen bimbingan tersebut.

- b. Bahwa proses pembelajaran terhadap Taruna dalam upaya menghasilkan SDM-KP yang berkualitas tinggi, membutuhkan dukungan ketersediaan prasarana/ sarana yang memadai dan layak. Untuk mencapai ketersediaan yang secara normatif dikatakan memadai dan layak, diperlukan suatu instrumen yang dapat dijadikan alat evaluatif. Instrumen tersebut adalah standar sarana dan prasarana. Politeknik KP Sorong belum memiliki standar yang dimaksud tersebut. Harus diikhtiarkan bahwa Politeknik KP Sorong memiliki standar tersebut. Terbentuknya standar ini harus melalui sinergitas antara pusdik dan Politeknik KP di lingkungan KKP.
- d. Keberadaan sarpras yang tidak dipandu oleh standar baku akan menimbulkan masalah kesenjangan antara kebutuhan proses pendidikan dengan ketersediaan dan kualitas dari sarpras tersebut. Masalah yang timbul adalah adanya ketersediaan alat yang tidak memenuhi rasio Alat/Taruna, atau alat tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Situasi seperti ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan riset.

II. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Penelitian merupakan upaya mencari kebenaran, temuan, dan solusi dari suatu permasalahan. Melalui kegiatan penelitian akan diperoleh informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian masalah. Untuk memajukan penelitian di Politeknik KP Sorong, masih ada kendala/masalah yang harus diperbaiki.

- a.1. Permintaan pemerintah setempat/lembaga non-pemerintah sangat rendah terhadap jasa penelitian di bidang kelautan dan perikanan.
- a.2. Hasil penelitian berupa teknologi tepat guna untuk diabdikan pada masyarakat KP di pedesaan masih kurang.
- b. Untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, diperlukan sarana berupa kapal ukuran 30 GT. Politeknik KP Sorong saat ini tidak memiliki kapal tersebut.

III. Kerjasama Politeknik KP Sorong dengan Pihak Lain

Politeknik KP Sorong telah menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik kerjasama dengan lembaga luar negeri maupun dengan lembaga dalam negeri. Dengan lembaga luar negeri adalah kerjasama di bidang riset, yaitu riset ilmu murni. Sedangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri, di samping riset juga kerjasama praktik lapang taruna. Untuk memajukan kerjasama ini, Politeknik KP Sorong menghadapi kendala :

- a. Kerjasama dengan pihak luar negeri masih terbatas dengan IRD Perancis. Perlu diperluas dengan pihak lain di luar negeri.
- b. Kerjasama dengan pihak dalam negeri masih sangat terbatas. Perlu diperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan antar perguruan tinggi. Kerjasama dengan dunia usaha tidak hanya dalam penempatan praktik lapangan, tetapi juga dalam hal pemanfaatan lulusan sebagai tenaga kerja.

IV. Pengelolaan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan seperti instalasi, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain; di samping membutuhkan tenaga dosen, juga membutuhkan tenaga penunjang. Keberadaan dan peranan tenaga penunjang ini berkaitan dengan kegiatan praktik taruna. Tanpa tenaga penunjang seperti teknisi, laboran, pustakawan, dan ABK maka pelaksanaan praktik tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk pengelolaan fasilitas pendidikan, tenaga penunjang di Politeknik KP Sorong masih kurang, sehingga perlu ditambah secara bertahap.

Lingkungan internal adalah lingkungan yang memiliki faktor kekuatan (Strengths) dan faktor kelemahan (weaknesses), yang dapat dikelola oleh

organisasi. Faktor kekuatan memiliki sifat membantu (helpful), sedangkan faktor kelemahan memiliki sifat membahayakan (harmful) bagi organisasi. Faktor-faktor internal pada Politeknik KP Sorong adalah :

1.1 Kekuatan (Strengths)

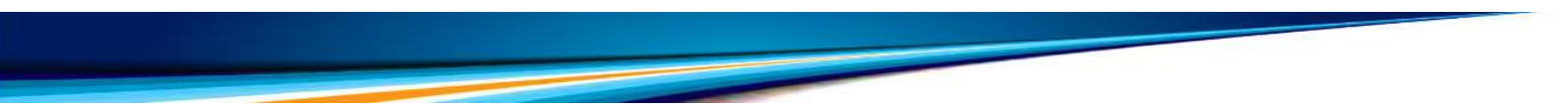
Kekuatan Politeknik KP Sorong dapat dipetakan sebagai berikut :

- 1) Merupakan Perguruan Tinggi yang berstatus negeri, yang dibina oleh Badan Riset dan SDM-KP dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi bidang Kelautan dan Perikanan di Wilayah Timur Indonesia .
- 2) Memiliki lahan kampus $\pm$ 12 Ha, yang letaknya sangat strategis, yaitu terletak di kawasan Kepala Burung Pulau Papua, tepatnya berada di pinggir pantai (Kota Sorong).
- 3) Memperoleh predikat Akreditasi program studi dari BAN-PT dengan Nilai Baik Sekali untuk semua program studi jenjang D-III.
- 4) Memiliki prasarana kantor dan prasarana pendidikan yang representatif dan relatif lengkap.
- 5) Memiliki SDM-KP yang memenuhi standar kualitas, yaitu tenaga dosen dengan level pendidikan S-2 dan S-3, tenaga penunjang akademik dengan level pendidikan D-III dan S-1, dan tenaga administrasi dengan level pendidikan D-III, S-1 dan S-2.
- 6) Memiliki Jurnal Ilmiah yang terakreditasi Sinta 3 versi Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti dengan identitas EISSN : 26219638.

1.2 Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan Politeknik KP Sorong dapat dipetakan sebagai berikut :

- 1) Nilai akreditasi Institusi Politeknik KP Sorong dari BAN-PT belum mencapai nilai Unggul . Saat ini nilai akreditasi institusi Politeknik KP Sorong adalah Baik Sekali.
- 2) Belum memiliki standar baku tentang sarana/prasarana pendidikan.
- 3) Sarana pendidikan pada sebagian besar fasilitas pendidikan belum mencapai rasio yang baik.

- 
- 4) Jumlah tenaga penunjang akademik, yakni teknisi, pustakawan, laboran, dan tenaga administrasi akademik masih kurang .
 - 5) Lahan seluas 42 Ha yang terletak di depan kampus, telah diserahkan dari Dirjen Perikanan (Deptan) kepada Politeknik KP Sorong (APSOR) bersamaan dengan penyerahan lahan kampus seluas 12 Ha, namun belum dilakukan balik nama/sertifikasi .
 - 6) Fasilitas Basic Safety Training belum tuntas proses approvalnya dan akreditasinya .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas pendidikan formal, dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik KP Sorong wajib memajukan organisasinya di bidang pendidikan tinggi vokasi. Untuk mencapai kemajuan itu, maka politeknik KP Sorong harus menjalankan aktivitas yang sesuai dengan karesteristik organisasinya secara berkesinambungan, terarah, sistematis, terkendali, dan berkorelasi dengan isu-isu strategis lingkungan.

Isu-isu strategis lingkungan merupakan realitas kehidupan yang bersifat dinamis dan sekaligus masalah, sehingga diperlukan suatu konsep/instrumen untuk mengelolanya, yaitu suatu pengelolaan isu (masalah) untuk dijadikan sesuatu yang produktif dan solutif bagi lingkungan. Konsep yang dimaksud tersebut adalah perencanaan, yaitu perencanaan strategis, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra). Sebagai suatu organisasi dibawah naungan KKP, maka Politeknik KP Sorong dalam renstranya tentunya mengacu pada kebijakan KKP, kebijakan Badan Riset dan SDM KP, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi. Melalui renstra tersebut, aktivitas pendidikan formal vokasi, dapat dilakukan dengan baik dan benar. Renstra merupakan pedoman bagi Politeknik KP Sorong dalam menjalankan roda organisasi menuju pencapaian tujuan yang benar dalam kurun waktu lima tahun, yaitu 2025-2029.

A. Visi

Visi merupakan cita-cita atau dambaan organisasi untuk dimiliki atau diperoleh di masa mendatang. Visi itu haruslah berkorelasi dengan induk organisasi, agar diperoleh suatu garis kesinambungan dan harmonisasi perwujudannya. Induk organisasi Politeknik KP Sorong secara berjenjang adalah KKP, dan BPPSDM-KP.

Politeknik KP Sorong merupakan salah satu UPT yang mendukung visi KKP (2025-2029), yaitu: "**Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**".

Visi Politeknik KP Sorong adalah mendukung visi BPPSDM-KP, yaitu : "Menjadi institusi pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing, berbasis teknologi dan keahlian terapan, serta menjadi penggerak program Ekonomi Biru untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur (2026-2029)."

Visi tersebut akan mampu mendukung visi BPPSDM-KP, karena Politeknik KP Sorong akan menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul di Kawasan Timur Indonesia, yaitu unggul dalam bidang iptek kelautan dan perikanan dalam tata kelola tridharma PT. Melalui keunggulan tersebut, Politeknik KP Sorong akan menghasilkan SDM yang handal dalam mengelola sumberdaya kelautan perikanan, sehingga akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan /kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

B. Misi

Visi sebagai cita-cita yang bersifat abstrak, sehingga perlu dilakukan aksi agar menjadi lebih nyata. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Politeknik KP Sorong selalu menyelaraskan dengan Misi KKP yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Untuk mendukung misi dari KKP dan BPPSDM-KP maka Politeknik KP Sorong melaksanakan perlu melakukan beberapa hal yaitu :

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang mencakup pengajaran, pelatihan, dan praktik kompetensi berbasis industri di sektor kelautan dan perikanan;
- 2) Mengembangkan penelitian terapan, inovasi teknologi, dan IPTEK kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan daya saing daerah, keberlanjutan sumber daya,

- dan solusi praktis bagi industri serta masyarakat pesisir;
- 3) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui program pendampingan, pemberdayaan, dan diseminasi inovasi berbasis keunggulan lokal untuk mendukung transformasi ekonomi biru dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Membangun sistem pembinaan taruna yang menumbuhkan karakter, kedisiplinan, dan profesionalitas melalui program ketarunaan yang konsisten, penguatan soft skills, serta layanan pembinaan, karier, dan alumni yang berkelanjutan;
 - 5) Memperkuat tata kelola dan sistem penjaminan mutu yang akuntabel dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan pengawasan internal yang transparan, efisien, dan berintegritas;
 - 6) Mengembangkan kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, lembaga riset, dan mitra internasional untuk mendukung praktik kerja industri, riset terapan, inovasi, dan penyerapan lulusan;
 - 7) Mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran guna mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri.

C. Tujuan

Tujuan organisasi dapat dibedakan atas tujuan umum, dan tujuan spesifik. Tujuan umum merupakan penjabaran dari visi organisasi. Sedangkan tujuan spesifik adalah suatu pernyataan yang bersifat kuantitatif guna mengukur keberhasilan pencapaian tujuan umum.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tujuan umum Politeknik KP Sorong (2026-2029), yakni :

“Ingin menjadi Politeknik unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan dalam tata kelola tridharma di Kawasan Indonesia Timur”.

Guna mencapai tujuan umum tersebut, maka perlu dirumuskan tujuan spesifik atau tujuan stradidik, dimana tujuan stradidik ini dijabarkan dari misi. Dengan tujuan stradidik ini, maka upaya pencapaian tujuan umum/visi dapat menjadi sesuatu yang terarah dan operasional. Atas dasar pemikiran tersebut, maka tujuan stradidik Politeknik KP Sorong yang ingin dicapai selama 2020-2024 adalah :

- (1) Menghasilkan SDM-KP yang kompeten dan berkarakter baik pada level D-III;
- (2) Menghasilkan produk riset terapan/murni untuk pengembangan iptek yang inovatif, serta untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- (3) Meningkatkan produktifitas pelaku utama melalui kegiatan pengabdian kepada

- masyarakat di pedesaan/pesisir kelautan dan perikanan;
- (4) Mewujudkan pengembangan organisasi Politeknik KP Sorong melalui pendirian program D-I, D-IV, dan Pasca Sarjana Sains Terapan;
 - (5) Meningkatkan jejaring kerjasama dengan organisasi/lembaga lain (nasional/internasional), guna memperkuat program riset, pendidikan, pelatihan, dan penjaminan mutu;
 - (6) Membangun prasarana, dan mengadakan sarana pendidikan/perkantoran yang sesuai dengan standar, guna mendukung pengembangan organisasi/ pendidikan Politeknik KP Sorong;
 - (7) Mewujudkan pembinaan berkarakter terhadap Taruna, agar menjadi Taruna yang inovatif, produktif, dan religius;
 - (8) Mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel melalui : pencapaian nilai Sangat Unggul pada akreditasi institusi, dihasilkannya standar prasarana pendidikan / perkantoran, bertambahnya tenaga dosen/kependidikan, diterimanya anak pelaku utama sebagai Taruna, terkelolanya anggaran secara efisien, terlaksananya sertifikasi kompetensi Taruna/tenaga pendidik/kependidikan, terbentuknya kelompok wirausaha, PNBP yang sektor ke kas negara, dan sertifikasi lahan.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan merupakan instrumen penting dalam perencanaan kegiatan, yang berfungsi untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran kegiatan ini merupakan derivasi dari tujuan kegiatan.

Sasaran kegiatan Politeknik KP Sorong Tahun 2025-2029 beserta target Kinerja Politeknik KP Sorong ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik KP Sorong, Periode 2025 – 2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	123	144	88	104	60

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Sorong (Orang)	141	88	104	60	60
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong yang kompeten (Orang)	371	345	308	257	147
		4	Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik KP Sorong (Juta Rp)	140	147	154	162	170
		5	Kerjasama Politeknik KP Sorong yang disepakati (Kesepakatan)	2	3	3	4	4
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Sorong yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	100	100	100	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	100	100	100	100	100
2	Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi.	8	IKU 6 Persentase mata kuliah dengan RPS berbasis OBE (%)	60	70	80	90	100
		9	Persentase mata kuliah yang mengimplementasikan OBE (%)	50	60	70	85	100
		10	Persentase kelas yang menggunakan LMS/e-learning (%)	40	55	65	75	85
		11	Persentase tingkat kepuasan taruna terhadap layanan akademik (%)	80	82	84	86	88
		12	Persentase pelaporan PDDIKTI yang lengkap, benar, dan tepat waktu (%)	95	97	98	99	100
3	Peningkatan kualitas SDM dosen dan daya dukung akademik.	13	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa	01:20	01:19	01:18	01:17	01:16
		14	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 (%)	12	15	18	22	25
		15	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala/Profesor (%)	10	12	14	16	18
4	Peningkatan produktivitas dan kualitas	16	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong (Paket)	1	1	2	2	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	penelitian terapan.	17	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Sorong (Lembaga)	1	-	-	-	-
		18	Jumlah penelitian terapan yang didanai per tahun (Judul)	1	1	2	2	2
		19	Persentase penelitian yang sesuai roadmap institusi (%)	75	80	85	90	95
5	Peningkatan luaran penelitian dan penguatan budaya riset.	20	Jumlah publikasi ilmiah terindeks minimal Sinta 2 (Artikel)	8	9	10	12	14
		21	Jumlah HKI (paten, desain industri, merek)	3	4	5	6	7
		22	Jumlah produk/prototipe/TTG hasil penelitian	-	-	1	1	1
		23	Jumlah kegiatan penguatan budaya riset. (Kegiatan)	1	1	1	2	2
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas program pengabdian kepada masyarakat.	24	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong (Kelompok)	1	1	2	2	2
		25	Jumlah luaran PkM (modul, TTG, produk, publikasi)	4	5	6	7	8
		26	Persentase PkM yang sesuai roadmap institusi (%)	80	82	84	86	88
7	Peningkatan dampak, keberlanjutan, dan kolaborasi PkM.	27	IKU 25 Jumlah PkM kolaboratif (Kegiatan)	4	5	6	7	8
		28	Persentase program PkM yang memberikan dampak terukur (%)	70	71	72	73	74
8	Peningkatan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan budaya kampus yang aman dan inklusif.	29	Skor Indeks Pembinaan Karakter dan Kedisiplinan Taruna (IPKPA)	80	81	82	83	84
		30	Jumlah pelanggaran disiplin taruna per tahun (Kasus)	30	28	26	25	23
9	Peningkatan soft skills dan kesiapan kerja	31	Jumlah kegiatan penguatan soft skills per tahun (Kegiatan)	1	1	2	2	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	taruna.	32	Jumlah prestasi taruna pada kompetisi akademik/non-akademik (Prestasi)	2	3	3	4	4
10	Penguatan layanan kemahasiswaan, konseling, dan pengembangan karier.	33	Tingkat kepuasan layanan kemahasiswaan (%)	85	86	87	88	89
		34	Persentase implementasi kebijakan Kampus Aman (anti kekerasan/perundungan/K3) (%)	50	55	60	70	75
		35	Jumlah pemanfaatan layanan konseling & pengembangan karier (Pengguna)	100	110	120	130	140
11	Peningkatan tata kelola, integritas, dan efektivitas kelembagaan.	36	Unit Kerja Politeknik KP Sorong yang dibangun berpredikat WBK/WBBM (Unit)	1	1	1	1	1
		37	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)	85	86	87	88	89
		38	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong (Nilai)	81	82	83	84	85
12	Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia.	39	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sorong (Indeks)	84	84	85	85	86
	Penguatan sistem informasi, administrasi digital, dan kepatuhan SPMI.	40	Persentase kelengkapan SRUP (%)	80	82	84	86	88
		41	Tingkat efektivitas manajemen risiko (indeks)	70	73	75	78	80
		42	Persentase standar SPMI yang melalui siklus PPEPP (%)	75	80	85	90	95
		43	Persentase kepatuhan terhadap dokumen mutu (%)	85	88	90	92	94
13	Peningkatan kepatuhan pengawasan, manajemen risiko, dan kualitas layanan	44	Jumlah kebijakan GUG yang diimplementasikan (Kebijakan)	5	6	7	8	9
		45	Tingkat pemanfaatan sistem informasi manajemen (%)	85	88	90	92	94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	publik.	46	Tingkat keterbukaan informasi publik oleh PPID (%)	90	90	90	92	92
14	Peningkatan jumlah dan efektivitas kemitraan pendidikan dan industri.	47	Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran/magang di DUDI (Orang)	88	104	60	60	60
		48	Jumlah MoU/MoA aktif dan termanfaatkan (Dokumen)	10	12	14	16	18
	Penguatan kerja sama riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat.	49	Jumlah kerja sama riset internasional (Kegiatan)	1	1	1	2	2
		50	Jumlah kegiatan co-teaching, co-research, dan visiting professor (Kegiatan)	1	1	2	2	3
		51	Jumlah kontribusi industri terhadap riset/kurikulum/sarpras	1	1	1	2	2
15	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan laboratorium.	52	Tingkat pemenuhan dukungan teknis sarpras (%)	90	92	94	95	97
		53	Skor kualitas sarpras pembelajaran	80	82	84	86	88
		54	Pemenuhan sarpras ramah disabilitas	60	65	70	75	80
16	Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.	55	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%)	80	82	84	86	88
		56	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Politeknik KP Sorong (%)	90	90	91	91	92
		57	IKU 57 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	92	92	92	93	93
		58	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	71.5	73	74	75	75
		59	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik KP Sorong (%)	100	100	100	100	100
17	Penguatan fasilitas pembelajaran	60	Persentase utilisasi laboratorium, workshop dan kapal latih (%)	70	72	74	76	78

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	digital, perpustakaan, dan layanan disabilitas.	61	Jumlah koleksi dan akses e-library (Akses)	100	120	140	160	180
		62	Tingkat keamanan data dan infrastruktur TIK	80	82	84	86	88

2. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja Tahunan merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Politeknik KP Sorong Tahun 2026. Rencana Kerja Tahunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas dan Fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong pada tahun 2026.

Pada tahun 2026 Politeknik KP Sorong dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.348.662.000,- (Dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Secara rincian alokasi anggaran Politeknik KP Sorong pada tahun 2026 setiap output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Politeknik KP Sorong Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu Revisi(Rp)
1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	3.133.818.000
2	Akreditasi Lembaga	3.500.000
3	Sertifikasi Profesi dan SDM	3.500.000
4	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, kelautan dan perikanan	3.260.292.000
5	Penelitian dan Pengembangan Modeling	17.500.000
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.929.252.000
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	800.000
Total		22.348.662.000

Berdasarkan tabel pagu anggaran, terlihat alokasi anggaran sebesar Rp. 22.348.662.000,- dengan rincian Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Rp3.133.818.000; Akreditasi Lembaga Rp3.500.000; Sertifikasi Profesi dan SDM

Rp3.500.000; Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan Rp3.260.292.000; Penelitian dan Pengembangan Modeling Rp17.500.000; Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp15.929.252.000; serta Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp800.000. Porsi terbesar pada dukungan manajemen menegaskan pentingnya tata kelola.

Alokasi anggaran sebesar Rp22,35 miliar perlu diarahkan secara optimal untuk mendukung kebijakan kementerian, khususnya pada pemenuhan prioritas direktif, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta pengembangan kompetensi SDM melalui sertifikasi dan akreditasi. Porsi terbesar pada layanan dukungan manajemen menunjukkan pentingnya tata kelola yang efektif. Selain itu, anggaran harus dimanfaatkan untuk mendorong penelitian dan pengembangan institusi. Perlu diperhatikan bahwa anggaran bersifat dinamis dan dapat direvisi sewaktu-waktu mengikuti kebijakan nasional, sehingga fleksibilitas perencanaan dan pengendalian menjadi kunci agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

3. Perjanjianj Kinerja

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2026 yang telah disusun kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 dan menjadi tolak ukur untuk upaya menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja program dan kegiatan Politeknik KP Sorong pada Tahun 2026 terdapat 2 Sasaran Kegiatan dan 16 Indikator Kinerja Kegiatan, Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Politeknik KP Sorong Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	01.01	Lulusan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (Orang)	121
		01.02	Jumlah lulusan Politeknik KP Sorong (Orang)	86
		01.03	Jumlah kerjasama Politeknik KP Sorong di tahun berjalan (kesepakatan)	2
		01.04	Persentase lulusan Politeknik KP Sorong yang besertifikasi kompetensi (%)	100
		01.05	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong (Kajian)	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		01.06	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Sorong (kelompok)	2
		01.07	Jumlah pendidik Politeknik KP Sorong yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1
		01.08	Persentase Penilaian Mutu Politeknik KP Sorong (%)	79
		01.09	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Sorong (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	02.01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)	86
		02.02	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong (Nilai)	82
		02.03	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sorong (Indeks)	85
		02.04	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Politeknik KP Sorong (Nilai)	71
		02.05	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%)	77
		02.06	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	92,1
		02.07	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	71,75

4. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Politeknik KP Sorong Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU dapat dilihat pada Gambar 3.

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 3. Status Indeks Capaian IKU

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja Politeknik KP. Sorong dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana Surat Keputusan Direktur Politeknik KP. Sorong NOMOR B.621/POLTEK.SRG/ TU.110/IV/2026, Tentang Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong Tahun 2026

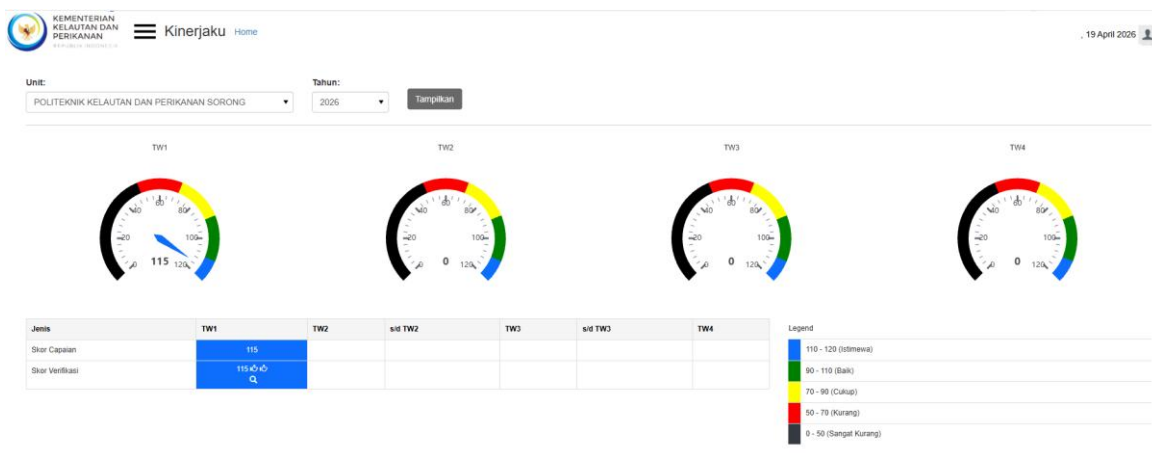
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Prestasi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang dicapai oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online : www.kinerjaku.kkp.go.id yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Manual IKU pada masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Politeknik KP Sorong TW I tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. NKO Politeknik KP Sorong TW I Tahun 2026

NKO (Nilai Kinerja Organisasi) Politeknik KP Sorong merupakan gambaran nilai kinerja Politeknik KP Sorong pada TW I Tahun 2026. NKO Politeknik KP Sorong adalah sebesar **115,00%** yang diperoleh dari pengukuran 3 IKU.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik KP Sorong. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan dan tujuan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Politeknik KP Sorong yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Kegiatan Politeknik KP Sorong pada TW I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Capaian Kinerja Politeknik KP Sorong TW I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET Tahun 2026	Target TW I	Capaian	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	01.01	Lulusan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (Orang)	121	7	12	120
		01.02	Jumlah lulusan Politeknik KP Sorong (Orang)	86	0	0	0
		01.03	Jumlah kerjasama Politeknik KP Sorong di tahun berjalan (kesepakatan)	2	0	0	0
		01.04	Persentase lulusan Politeknik KP Sorong yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	0	0	0
		01.05	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong (Kajian)	3	0	0	0
		01.06	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Sorong (kelompok)	2	0	0	0
		01.07	Jumlah pendidik Politeknik KP Sorong yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1	0	0	0
		01.08	Persentase Penilaian Mutu Politeknik KP Sorong (%)	79	0	0	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET Tahun 2026	Target TW I	Capaian	%
		01.09	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Sorong (%)	80	0	0	0
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	02.01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)	86	86	86	100
		02.02	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong (Nilai)	82	0	0	0
		02.03	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sorong (Indeks)	85	0	0	0
		02.04	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Politeknik KP Sorong (Nilai)	71	0	0	0
		02.05	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%)	77	77	100	120
		02.06	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	92,1	0	0	0
		02.07	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	71,75	0	0	0

1) Sasaran Kegiatan 01 (SK 01) : Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Untuk mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten, terdapat 9 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan yaitu :

a. IKS 01.01 : Lulusan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Merupakan indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan Pendidikan KP mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/ mengembangkan usaha dan

atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/foto produk, media penjualan dan harga jual.

Perhitungan capaian IKU ini adalah Akumulasi Jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan dan/atau merintis usaha atau terlibat dalam kegiatan produktif serta mengikuti persiapan kerja baik pada dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja.

Periode pengukuran IKU ini yaitu per triwulan dengan target TW I sebanyak 7 orang dengan capaian 12 orang atau 120 %. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 121 orang yang diperoleh dari 86 % jumlah lulusan tahun 2026. Serapan IKU ini secara nasional dapat kita lihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Penyerapan Lulusan Satuan Pendidikan KP ke DUDIKA

Triwulan I Tahun 2026

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Lulusan 2025	TW I		
			Target	Capaian	%
1	Politeknik AUP	506	25	30	120
2	Politeknik KP Sidoarjo	196	9	12	120
3	Politeknik KP Bitung	146	7	16	120
4	Politeknik KP Sorong	141	7	12	120
5	Politeknik KP Karawang	93	5	7	120
6	Politeknik KP Kupang	207	10	12	120
7	Politeknik KP Bone	295	15	20	120
8	Politeknik KP Dumai	95	5	8	120
9	Politeknik KP Pangandaran	88	4	6	120
10	Politeknik KP Jember	165	10	18	120
11	AK KP Wakatobi	41	2	3	120
12	SUPM Ladang	73	4	5	120
13	SUPM Pariaman	121	7	10	120
14	SUPM Kotaagung	73	4	5	120
15	SUPM Tegal	144	8	8	120
16	SUPM Waiheru	105	6	8	120
Jumlah		2489	128	180	120

Data menunjukkan bahwa total lulusan tahun 2025 sebanyak 2.489 orang, dengan target penyerapan Triwulan I sebesar 128 orang dan realisasi mencapai 180 orang atau 120%. Seluruh satuan pendidikan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Politeknik

AUP mencatat capaian tertinggi dengan 30 orang, diikuti Politeknik KP Bone (20 orang) dan Politeknik KP Jember (18 orang). Politeknik KP Sorong sendiri mencapai 12 orang dari target 7 orang atau 120%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyerapan lulusan ke dunia usaha dan dunia industri (DUDIKA), meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas penempatan kerja lulusan.

b. IKS 01.02 : Jumlah Lulusan Politeknik KP Sorong (orang)

Merupakan indikator Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di satuan pendidikan KP baik jenjang pendidikan tinggi maupun menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus/ijazah pada tahun berjalan.

Perhitungan capaian IKU ini adalah akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan. Untuk TW I tidak terdapat target dan capaian IKU ini dapat diukur pada akhir tahun 2026 dengan target 86 Orang.

c. IKS 01.03 : Jumlah Kerjasama Politeknik KP Sorong di tahun berjalan (Kesepakatan)

Merupakan indikator yang menunjukkan usulan kerjasama satuan Pendidikan yang telah melalui proses telaah di internal Politeknik KP Sorong dalam rangka kegiatan tridharma. Kerjasama yang disepakati berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pencapaian IKU ini adalah jumlah usulan kerjasama baik dari Pusat Pendidikan KP maupun satuan Pendidikan yang disepakati di tahun berjalan, capaian IKU ini dapat diukur pada akhir tahun 2026 dengan target 2 kesepakatan.

d. IKS 01.04 : Persentase lulusan Politeknik KP Sorong yang bersertifikasi kompetensi (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan resmi atas keahlian, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu (seperti ANKAPIN, ATKAPIN, CBIP, dll)

Perhitungan capaian IKU ini dengan cara jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi dibagi dengan jumlah peserta didik tingkat akhir pada

tahun berjalan dikali seratus persen. Capaian IKU ini dapat diukur pada akhir tahun 2026 dengan target seratus persen (100%).

e. IKS 01.05 : Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong (Kajian)

Merupakan jumlah kajian atau hasil penelitian dari masing-masing satuan pendidikan, yang terkait langsung dengan program prioritas KKP. Program Prioritas KKP yaitu 1) memperluas kawasan konservasi laut, 2) PIT berbasis kuota, 3) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan

Perhitungan capaian IKU ini adalah akumulasi jumlah kajian pendidikan tinggi yang mendukung program prioritas KKP pada tahun berjalan. Capaian IKU ini dapat diukur pada akhir tahun 2026 dengan target 3 kajian.

f. IKS 01.06 : Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Sorong (Kelompok)

Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan memberikan contoh langsung dan diuji cobakan oleh kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung di sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung. Dalam konteks kelautan dan perikanan, kegiatan pengabdian berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan yang berkelanjutan.

Acuannya yaitu Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 719 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup BPPSDMKP. Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan dan mengajarkan teknologi, metode, atau praktik yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan pengelolaan sumber daya laut. Kelompok yang mendapatkan pendampingan adalah kelompok yang melakukan uji coba teknologi hasil diseminasi.

Perhitungan capaian IKU ini akumulasi jumlah Kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung yang mengadopsi hasil Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang menerapkan hasil Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan. Capaian IKU ini dapat diukur pada akhir tahun 2026 dengan target 2 kelompok.

g. IKS 01.07 : Jumlah pendidik Politeknik KP Sorong yang lulus sertifikasi profesi (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan sertifikasi profesi dan/atau yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan teknis sesuai program studi/keahlian untuk mendukung proses pembelajaran. Tenaga Pendidik adalah dosen/guru dan tenaga pendukung pendidikan seperti laboran, teknisi tambak, teknisi hatchery, dll yang mendukung proses pembelajaran.

Pendidik adalah guru dan dosen pegawai profesional dari PNS/ASN KKP yang diberi tugas untuk melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Sertifikasi Dosen (Serdos) adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen sebagai pengakuan formal atas profesionalisme, kompetensi, dan kelayakan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Acuan yang digunakan pada IKU ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen.

Perhitungan capaian IKU ini merupakan akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi. Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2026 dengan target yaitu 1 orang.

h. IKS 01.08 : Persentase Penilaian Mutu Politeknik KP Sorong (%)

Persentase penilaian mutu merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian standar kualitas suatu institusi pendidikan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Nilai ini biasanya diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja terhadap target mutu, mencakup aspek akademik, tata kelola, SDM, serta layanan pendidikan. Merupakan indikator yang menunjukkan persentase perolehan nilai mandiri terkait mutu satuan pendidikan pada tahun berjalan.

Perhitungan capaian IKU ini merupakan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi KP yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Pusat Pendidikan KP. Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2026 dengan target yaitu 79 %.

i. IKS 01.09 : Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Sorong (%)

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk mencapai maksud atau tujuan (seperti buku, komputer, simulator meubelair dll). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, sistem dsb.), seperti jalan, jembatan, sistem pengelolaan limbah, sanitasi air, telekomunikasi, dll.

Kapasitas adalah daya tampung, kemampuan, atau keluaran sesuatu dari suatu objek, tempat atau sistem dalam periode tertentu. Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan standar yaitu jumlah sarana prasarana yang diadakan/dipelihara oleh satuan pendidikan pada tahun berjalan sesuai dengan standar. Jumlah sarana prasarana yang akan ditingkatkan yaitu usulan rencana pengadaan/pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan KP pada tahun berjalan.

Perhitungan capaian IKU ini merupakan jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai standar dibagi jumlag sarana prasarana yang akan ditingkatkan kapasitasnya dikali seratus persen. Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2026 dengan target yaitu 80 %.

2) Sasaran Kegiatan 02 (SK 02) : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat 7 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu :

j. IKS 02.01 : Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Pusat Pendidikan KP.

Perhitungan capaian IKU ini merupakan persentase dari jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen dikalikan 100%. Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2026 dengan target yaitu 86 persen (%).

Capaian IKU ini pada TW I Tahun 2026 adalah sebesar 86% sesuai dengan Nota Dinas dari sekretaris BPPSDM nomor : 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan (Tabel 7) dan perbandingan persentase rekomendasi hasil pengawasan (Tabel 8) TW I Tahun 2025 Lingkup BRSDMKP .

Tabel 7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)

IKSK 02.01 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)									
Realisasi Tahun 2025	Target 2026	Capaian 2025		TW I 2026			% Kenaikan 2025-2026	Renstra 2025 -2029	
		TW I	TW II	Target	Realisasi	Capaian		Target 2026	% Capaian Terhadap renstras
85%	86%	85%	-	86%	86%	100,00%	101%	86	100,00%

IKU ini pada TW I memiliki target 86 % namun Politeknik KP. Sorong tidak memiliki Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan, maka nilai capaian dianggap sebesar 86% atau 100 %.

Tabel 8. Perbandingan Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM KP TW I Tahun 2026

No	Satker Pusat	Temuan Awal (saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BPPSDM KP	7	7	100
2	Pusat Pendidikan KP	1	1	100
3	Pusat Pelatihan KP	0	0	0
4	Pusat Penyuluhan KP	15	15	100
5	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP	0	0	0
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0
No	Satker	Temuan Awal (saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BPPP Tegal	1	1	100
2	BPPP Ambon	5	5	100
3	BPPP Bitung	1	1	100
4	Politeknik KP Karawang	13	13	100
5	Politeknik KP Dumai	6	6	100

Data diatas menunjukkan capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan dapat dilihat bahwa Politeknik KP Sorong tidak masuk dalam daftar dari Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.

k. IKS 02.02 : Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja.

Penilaian Mandiri SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Kategori nilai PM SAKIP dapat dilihat pada Gambar 5.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Gambar 5. Kategori nilai PM SAKIP

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2026 dengan target nilai yaitu 82.

l. IKS 02.03 : Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sorong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan

Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan capaian IKU ini dilakukan menggunakan aplikasi pada laman ropeg.kkp.go.id yang perhitungannya sesuai Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Disebutkan dalam peraturan tersebut, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut Peraturan ini adalah:

- Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
- Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat),

Data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- Diklat Kepemimpinan;
- Diklat Fungsional;
- Diklat Teknis; dan
- Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini, adalah:

- Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;

- Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Adapun instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini adalah:

- Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Sedangkan instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Untuk instrumen Pengukuran pada seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

“Keikutsertaan dalam seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/ surat tugas dan sejenisnya,”

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot, menurut Peraturan ini, penilaiannya adalah:

- Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Adapun instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

“Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir,”

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.

Selanjutnya kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- 91 – 100;
- 81 — 90;
- 71 – – 80;
- 61 — 70; dan
- 60 ke bawah.

Sedangkan sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud yaitu:

- Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91 — 100;
- Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81 — 90;
- Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71 — 80;

- Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61 — 70; dan
- Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Faktor yang berpengaruh pada ketercapaian IKU ini adalah tingginya kesadaran pegawai dalam meningkatkan kompetensinya untuk kepentingan kinerja satuan kerja dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat mendongkrak kapasitas kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Metode pengukuran yaitu semesteran, IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2026 dengan target 85.

m. IKS 02.04 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Politeknik KP Sorong (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%)
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),

- b. prasarana dan sarana (50%)

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada akhir tahun 2026 dengan target yaitu 71.

n. IKSK 02.05 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Perhitungan capaian IKU ini berpatokan pada nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP dikalikan 100% pagu pengadaan barang/jasa. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan selanjutnya dimana target tahun 2026 yaitu 77 persen (%).

o. IKSK 02.06 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi RDP (Halaman III DIPA), Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;

- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70 .

Penilaian nilai IKU ini mengacu pada indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri dari :

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai dan atau;
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA terdiri dari:

1. Revisi DIPA (Bobot Penilaian 10%)
 - Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif);
 - Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan;
 - Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik.
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – (Bobot Penilaian 10%)
 - Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan;
 - Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari;
 - Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik.
3. Penyerapan Anggaran (Bobot Penilaian 20%)
 - Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan;
 - Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan;
 - Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Penyerapan masing-masing belanja dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Target Penyerapan Masing – Masing Belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan formula:

$$TAn = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan formula:

$$TPBelPegn = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBarn = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelModn = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan dihitung dengan formula:

$$NKPan = (PAn)/(TPn) \times 100$$

4. Belanja Kontraktual (Bobot Penilaian 10%)

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%);

- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak;
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100;
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = (NK - Kw) \times 40\% + (NK\ Dini \times 30\%) + (NK\ BM \times 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan (Bobot Penilaian 10%)

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai;
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual;
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik.

$$RKTP = (SMP\ LS\ TW)/(SPM\ LS) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP (Bobot Penilaian 10%)

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni;
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%);
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW) \times 50\% + (NK - PGUP) \times 25\% + (NKSetor \times 25\%)$$

7. Dispensasi SPM (Bobot Penilaian 5%)

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Kategori Rasio Dispensasi SPM

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 - 0,099
Kategori 3	92	0,1 - 0,99
Kategori 4	85	1 - 4,99
Kategori 5	82	> - 5,00

Rasio Dispensasi (permil) RDSPM

$$= \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output (Bobot Penilaian 25%)

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%);
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n}$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Capaian kinerja IKU ini dapat diukur pada setiap semester tahun berjalan dengan target nilai 92,1.

p. IKSK 02.07 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemeneu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain :

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- Baik, apabila NKPA > 80-90;
- Cukup, apabila NKPA > 60-80;
- Kurang, apabila NKPA > 50-60;
- Sangat Kurang, apabila NKPA < 50.

Penilaian kinerja perencanaan anggaran satker sangat menentukan NKA eselon I. NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Bobot Indikator nilai Kinerja Anggaran

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1. Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga

RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1. Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume Roi

TVRO_i : Target Volume Rii

N : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) \\ + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKPA Unit Eselon I adalah sebagai berikut :

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEF_{Satker} \times W_{NEF_{Satker}}) \\ + (NE_{Satker} \times W_{NE_{Satker}})$$

Keterangan :

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

Nefsatker : Nilai Efektivitas Satker

Nesatker : Nilai Efisiensi Satker

WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEFsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Capaian kinerja IKU ini di ukur pada tahun 2025 berjalan dengan target nilai 71,75.

3. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Politeknik KP Sorong berdasarkan DIPA Satker Politeknik KP Sorong Tahun 2026 sebesar Rp. 22.348.662.000,- Dalam pelaksanaannya, data penyerapan anggaran sesuai data yang didapatkan dari OM – SPAN 2026 Politeknik KP

Sorong, sampai dengan tanggal 17 April 2026 terealisasi sebanyak Rp. 4.760.293.896,- atau 21,06% dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Politeknik KP Sorong Per Sasaran Kegiatan hingga TW I Tahun 2025 (Sumber : sakti.kemenkeu.go.id)

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	3.133.818.000		-
2	Akreditasi Lembaga	3.500.000		-
3	Sertifikasi Profesi dan SDM	3.500.000		-
4	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, kelautan dan perikanan	3.260.292.000	677.787.117	19.67
5	Penelitian dan Pengembangan Modeling	17.500.000		-
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.929.252.000	4.082.506.779	25.63
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	800.000		-
Total		22.348.662.000	4.760.293.896	21.06

Serapan anggaran TW I terjadi pada kegiatan Pendidikan Vokasi bidang pertanian, kelautan, dan perikanan sebesar Rp 677.787.117 (19,67%). Selain itu, Layanan Dukungan Manajemen Internal terealisasi Rp 4.082.506.779 (25,63%). Kedua kegiatan ini menjadi kontributor utama realisasi anggaran dengan total serapan mencapai Rp 4.760.293.896 (21,06%). Berdasarkan pagu anggaran Politeknik KP. Sorong di atas, rincian realisasi anggaran berdasarkan output sesuai IKU Politeknik KP Sorong dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Output

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung	Anggaran / Pagu (Rp)	Satuan Output/ Komponen	Target Output Komponen	Target Output Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	01.01 Lulusan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (Orang)		Orang	121			7			7			7			100
		01.02 Jumlah lulusan Politeknik KP Sorong (Orang)	0	Orang	86							86					
		01.03 Jumlah kerjasama Politeknik KP Sorong di tahun berjalan (kesepakatan)		Kesepakatan	3												3
		01.04 Persentase lulusan Politeknik KP Sorong yang bersertifikasi kompetensi (%)		%	100							100					
		01.05 Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong (Kajian)	17.500.000	Kajian	3												3
		01.06 Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Sorong (kelompok)	25000000	Kelompok	2						1						1

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung	Anggaran / Pagu (Rp)	Satuan Output/ Komponen	Target Output Komponen	Target Ouput Bulanan											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		01.07	Jumlah pendidik Politeknik KP Sorong yang lulus sertifikasi profesi (Orang)		3.500.000	Orang	1							1					
		01.08	Persentase Penilaian Mutu Politeknik KP Sorong (%)		3.500.000	%	79												79
		01.09	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Sorong (%)	Peningkatan sarana dan prasarana	0	%	80												80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	02.01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)	Pelayanan rumah Tangga dan perlengkapan pendidikan kelautan dan perikanan	0	%	86			86			86			86			86
		02.02	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong (Nilai)	Pelayanan Keuangan	0	Nilai	82												82
		02.03	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sorong (Indeks)	Fasilitas Peningkatan Kompetensi		Indeks	85						71						85

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung	Anggaran / Pagu (Rp)	Satuan Output/ Komponen	Target Output Komponen	Target Ouput Bulanan											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		02.04	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Politeknik KP Sorong (Nilai)	Standarisasi kearsipan	0	Nilai	71												71
		02.05	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%)	Penelolaan Keuangan	0	%	77			77			77			77			77
		02.06	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	Pengelolaan Keuangan	0,00	Nilai	92,1												
		02.07	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	Pengelolaan Keuangan	0	Nilai	71,75												1

4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Politeknik KP Sorong sebagai organisasi sektor pendidikan dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan 38 anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi(Tabel14) ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Tabel 14.Perhitungan Efisiensi Anggaran Politeknik KP. Sorong TW I

Capaian Sasaran Program	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
100	58,09	98,26	21,06	20	100

Efisiensi anggaran politeknik KP. Sorong memperoleh skor +20 dengan nilai efisiensi 100%, pencapaian efisiensi sebesar +20 menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan anggran Politeknik KP. Sorong berjalan dengan baik.

Pencapaian Nilai Prestasi Sasaran Strategis Politeknik KP Sorong pada TW I tahun 2026 adalah sebesar 115,00 % dimana pada TW I terdapat 3 IKU yang di ukur dengan rincian capaian sebagai berikut :

1. IKS 01.01 : Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) target TW I pada tahun 2026 yaitu 7 orang dengan capaian 12 orang dengan persentase capaian 120 %. Pengukuran IKU ini bersumber dari data lulusan tahun 2026;
2. IKS 02.01 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%) dengan target pada TW I yaitu 86 dengan capaian 86 dan tingkat ketercapaian 100% , pada TW I ini Politeknik KP. Sorong tidak memiliki Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan, sehingga tingkat ketercapaian 117,65% dengan nilai capaian ini tidak mempengaruhi nilai capaian pada IKU lain;
3. IKS 02.05 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%), dengan target sebesar 77, realisasi 100 dan tingkat ketercapaiannya 120%, nilai ini sesuai dengan yang diumumkan pada SIRUP, agar tidak mempengaruhi nilai capaian pada IKU lain;

BAB IV

PENURTUP

1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Politeknik KP Sorong TW I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama *Logical Frame Work* pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Politeknik KP Sorong di tingkat korporat TW I tahun 2026 sebesar 115,00% (Gambar 6).



Gambar 6. NKO Politeknik KP Sorong TW I Tahun 2026

Dari data capaian kinerja pada gambar 7 diatas adalah capaian dari 3 indikator yang memiliki target pada TW I dari 16 indikator kinerja akan diukur pada periode lainnya:

1. IKS 01.01 : Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) target TW I pada tahun 2026 yaitu 7 orang dengan capaian 12 orang dengan persentase capaian 120 %. Pengukuran IKU ini bersumber dari data lulusan tahun 2026;
2. IKS 02.01 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%) dengan target pada TW I yaitu 86 dengan capaian 86 dan tingkat ketercapaian 100% , pada TW I ini Politeknik KP. Sorong tidak memiliki Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau tidak sebagai obyek

pengawasan pada periode pelaporan, sehingga tingkat ketercapaian 117,65% dengan nilai capaian ini tidak mempengaruhi nilai capaian pada IKU lain;

3. IKS 02.05 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%), dengan target sebesar 77, realisasi 100 dan tingkat ketercapaiannya 120%, nilai ini sesuai dengan yang diumumkan pada SIRUP, agar tidak mempengaruhi nilai capaian pada IKU lain;

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Dalam implementasi kinerja TW I tahun 2025 terdapat 3 IKU yang diukur yaitu Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%), Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong dan Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Sorong (%). Pada tiga IKU ini secara keseluruhan bisa tercapai dengan baik hanya saja pada IKU Presentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP. Sorong penanggung jawab kinerja mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan juga tidak berbenturan dengan IKU-IKU lainnya, sehingga **rekomendasinya** penanggungjawab kinerja bersama unsur pimpinan perlu melakukan inventarisir apa saja yang masuk dalam aspek pengukuran kinerja IKU ini yang tidak berkaitan dengan IKU lainnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Politeknik KP Sorong Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

JALAN KAPITAN PATTIMURA, TANJUNG KASUARI - SUPRAU
KOTAK POS 118 KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA 98411
LAMARAN www.polikpsorong.ac.id SUREL polteksorong@kkip.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Daniel Heintje Ndahawali**

Jabatan : **Direktur Politeknik KP Sorong**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : **Kepala Pusat Pendidikan KP**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Sorong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Daniel Heintje Ndahawali

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Lulusan Politeknik KP Sorong yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (Orang)	121
		2	Jumlah lulusan Politeknik KP Sorong (Orang)	86
		3	Jumlah kerjasama Politeknik KP Sorong di tahun berjalan (kesepakatan)	2
		4	Persentase lulusan Politeknik KP Sorong yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		5	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Sorong (Kajian)	3
		6	Kelompok masyarakat yang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik KP Sorong (kelompok)	2
		7	Jumlah pendidik Politeknik KP Sorong yang lulus sertifikasi profesi (Orang)	1
		8	Persentase Penilaian Mutu Politeknik KP Sorong (%)	79
		9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik KP Sorong (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong (%)	86
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Sorong (Nilai)	82
		12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Sorong (Indeks)	85
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Politeknik KP Sorong (Nilai)	71
		14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Sorong (%)	77
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	92,1
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Sorong (Nilai)	71,75